BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses seorang wanita mengandung janin dalam rahimnya hingga melahirkan adalah hal yang fisiologis bagi para ibu.¹ Setiap ibu mengalami pengalaman melahirkan yang berbeda-beda, karena umumnya seorang ibu baru melahirkan akan menghadapi berbagai perubahan fisik dan psikologis yang merupakan dampak dari proses persalinan yang dapat menimbulkan krisis kehidupan pada sebagian ibu.² Pada periode setelah kelahiran anak atau pascanatal, ibu perlu beradaptasi dengan perubahan fisik, emosional, dan psikologis segera setelah melahirkan, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan, menciptakan situasi baru bagi wanita untuk bernavigasi. Kelahiran bayi adalah pengalaman yang mengubah hidup seorang wanita dan bisa berdampak positif dan negatif pada psikologisnya.³

Perubahan fisik seperti bertambahnya berat badan, perut membesar hingga kaki membengkak menimbulkan perasaan sedih, kecewa dan merasa tidak percaya diri lagi. Perubahan psikologis, terjadi ditandai dengan adanya perubahan emosional, seperti merasa bahagia dan dalam waktu yang sama

¹ Dian Roza Adila, Defryanti Saputri, and Sekani Niriyah, "Pengalaman *Postpartum Blues* Pada Ibu Primipara" *Jurnal Ners Indonesia* 9, no. 2 (2019): hlm. 156, <http://dx.doi.org/10.31258/jni.9.2.156-162>.

² Sri Burhani Putri Wenny, Bunga Permata and Welly, *Gangguan Psikologis Pada Ibu Postpartum Psychiatric Mental Health Nursin* (Kabupaten Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023): hlm. 1 <https://repository.penerbiteitureka.com/publications/564548/gangguan-psikologis-pada-ibu-postpartum-psychiatric-mental-health-nursing>.

³ Sopiatus Nadariah, Nining Febriyana, and Dwi Izzati Budiono, "Hubungan Karakteristik Ibu Primipara Dengan Terjadinya Baby Blues," *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal* 3, no. 4 (2021): hlm. 1, <https://doi.org/10.20473/imhsj.v3i4.2019.278-286>.

merasa sedih berlebihan, kecemasan yang berlebihan, gampang menangis, ketidaksabaran, kurangnya keyakinan diri, sensitifitas meningkat dan mudah tersinggung, bahkan munculnya rasa tidak menyanyangi bayinya.⁴ Perubahan-perubahan ini menyebabkan wanita dalam masa nifas rentan terhadap berbagai gangguan kejiwaan.

Dalam istilah medis keadaan ini disebut dengan *baby blues syndrome* atau *postpartum blues* atau *maternity blues* yaitu perubahan emosional dan psikologis yang umumnya dirasakan setelah melahirkan.⁵ Sindrom *baby blues* adalah keadaan lazim yang dialami oleh ibu pasca melahirkan, namun jika sindrom ini tidak segera ditangani dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak. Menurut *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder (American Psychiatric Association, 2000)* mengenai pedoman resmi untuk penentuan diagnosa penyakit psikiatri, bahwa jenis gangguan psikologis masa postpartum dibagi menjadi tiga yakni postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum.⁶ Jika gejalanya semakin parah, bisa saja ibu melakukan kejahatan berupa tindak pidana penganiayaan bahkan menghilangkan nyawa bayinya yang baru lahir.

Tingkatan yang pertama yaitu *Baby Blues Syndrome*, menurut Andini Dwi Arumsari Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya, *baby blues syndrome* adalah suatu bentuk kesedihan atau kemurungan yang dialami

⁴ Rahmawati and Saida, "Analisis Korelasi Jenis Persalinan Dengan Kejadian Sindroma *Baby Blues*," *Jurnal Ilmiah Obsgin* 15, no. 2 (2023): hlm. 348, <https://doi.org/10.36089/job.v15i2.124>.

⁵ *Ibid*

⁶ Yeni Indri Lestari, "Hubungan Antara Faktor Psikososial, Dukungan Suami Dan Keluarga Dengan Kejadian Postpartum Blues" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2019): hlm. 17, <https://repository.ump.ac.id/9328/>.

ibu setelah melahirkan.⁷ Selanjutnya menurut Rizal Fadli jika sindrom *baby blues* tidak segera ditangani, kondisi tersebut bisa berdampak negatif tidak hanya pada ibu tapi juga bayi yang baru lahir.⁸ Tidak ada faktor yang spesifik yang menjelaskan penyebab terjadinya. Namun secara umum sindrom terjadi karena beberapa faktor seperti tidak ada faktor dukungan dari keluarga, kurangnya pengetahuan, latar belakang kehamilan, proses melahirkan, perubahan hormonal (terjadinya penurunan kadar estrogen, progesteron, prolaktin dan estriol setelah melahirkan akan berdampak pada masalah suasana hati dan depresi), faktor demografik (paritas dan usia), pekerjaan, perubahan fisik, serta ketidakmampuan beradaptasi.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *baby blues syndrome* adalah sesuatu yang umum dan normal dialami oleh banyak perempuan.

Tingkatan yang kedua adalah Depresi Postpartum atau *Postpartum Depression* hampir sama dengan *baby blues syndrome*, yang membedakan adalah durasinya lebih lama dan lebih hebat, depresi postpartum dialami seorang ibu paling lambat 8 minggu usai melahirkan.¹⁰ Menurut Janiwarty penyebab depresi postpartum yaitu kecewaan emosi yang diikuti dengan rasa tidak puas, ketakutan pada kehamilan dan persalinan, rasa sakit saat nifas, dan

⁷ Uswah Sahal, "Dosen Psikologi: Kenali Tanda Baby Blues Pada Ibu Pasca Melahirkan," m-surabaya.ac.id, 2022, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/dosen-psikologi-kenali-tanda-baby-blues-pada-ibu-pasca-melahirkan#:~:text=“Baby blues syndrom adalah suatu,tiga minggu sejak kelahiran bayi. Diakses pada 02 Mei 2024.>

⁸ Rizal Fadli, "Ibu Baru Bisa Alami Baby Blues Syndrome, Ini Cara Mengatasinya," halodoc, 2023, <https://www.halodoc.com/. kesehatan. Diakses pada 20 September 2023.>

⁹ Qonita, Umalihayati, and Vega Muhida, "Analisis Faktor Risiko Terjadinya Postpartum Blues Di Ruang Wijaya Kusuma," *Journal Of Applied Health Research And Development* 3, no. 1 (2021): hlm. 3, <https://doi.org/10.58228/jahrd.v3a1.95 t.>

¹⁰ Nurul Azizah, *Buku Ajar Psikologi Pendidikan Profesi Bidan*, ed. M.Tanzil Multazam and Mahardika D.K.W (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2023): hlm. 205, <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-084-7>

kelelahan karena kurang tidur selama persalinan. Selain itu, kecemasan akan ketidakmampuan dalam merawat bayi juga dapat menjadi penyebab utama dari depresi postpartum adalah ketakutan bahwa dirinya tidak lagi menarik di depan suaminya.¹¹

Tingkatan yang ketiga yang paling parah yaitu Psikosis Postpartum atau *Postpartum Psychosis* merujuk pada masalah kejiwaan serius yang dialami ibu setelah melahirkan. Gangguan ini ditandai dengan agitasi yang parah, perubahan suasana hati yang sangat cepat, depresi, dan delusi.¹² Gangguan ini jika tidak ditangani secara optimal, akan berdampak buruk bagi ibu yang mengalaminya, hubungan keluarga termasuk perkembangan ikatan bayi yang baru dilahirkan. Jarang terjadi, namun tragisnya, hal ini dapat menyebabkan bunuh diri dan pembunuhan bayi.¹³

Menurut laporan BBC News Indonesia tahun 2021 yang mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 10% dari ibu yang sedang hamil dan 13% dari ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan kesehatan mental, terutama depresi. Angka kejadian postpartum blues sangat tinggi di Asia, ada pada kisaran antara 26 hingga 85%, dan di Indonesia, berkisar antara 50 hingga 70% (Mardhatillah RMP et al., n.d.), sedangkan studi EPDS

¹¹ Ibid, hlm. 206

¹² Ibid, hlm. 209-210.

¹³ Marisa Casanova Dias and Ian R Jones, "Postpartum Psychosis," *The Continuous Textbook of Women's Medicine Series 7* (2021), <https://www.glowm.com/print-article.php?id=411363&1714939736>.

menunjukkan bahwa 14–17% Ibu yang baru melahirkan memiliki potensi untuk mengalami gejala postpartum blues pasca persalinan. (Aryani, 2022).¹⁴

Di Indonesia gejala *baby blues syndrome* sudah sering terjadi tetapi dianggap sebagai hal normal dan hal biasa terjadi pada ibu sebagai efek baru melahirkan sehingga kurangnya penanganan terhadap ibu, hal ini menyebabkan kondisi ibu semakin parah yang berujung dapat melakukan kejahatan. Sebagai contoh, terdapat kejadian di Desa Doda Bahari, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara pada 25 Februari 2020, di mana seorang ibu muda berinisial MF (21) tega menganiaya dua orang anaknya yang mengakibatkan kematian satu anaknya berusia empat bulan yang direndam dalam bak air. Sedangkan yang satu lagi berusia dua tahun, mengalami luka serius di belakang lehernya dan dalam kondisi kritis. Diduga, ibu tersebut mengalami sindrom *baby blues*, yang merupakan depresi pasca melahirkan, sebagaimana yang diindikasikan oleh riwayatnya. Hal ini sesuai dengan keterangan suami pelaku bahwa istrinya sering mengalami kemarahan dan depresi pasca melahirkan. Lebih lanjut, ibu tersebut (MF) sebelumnya pernah melakukan tindakan serupa saat melahirkan anak pertamanya, namun anak tersebut berhasil diselamatkan.¹⁵

Kasus kedua yang baru terjadi pada 16 Oktober 2023 lalu, video yang viral di media sosial. Seorang ibu berinisial A menenggelamkan bayinya ke

¹⁴ Dyah Titi Setyaningrum, Litra Amanda Metra, and Viradevi Eka Sukmawati, "Fenomena Postpartum Blues Pada Primipara (Ibu Dengan Kelahiran Bayi Pertama)," *Jurnal Kesehatan Mahardika* 10, no. 1 (2023): hlm. 28, <https://journal.mahardika.ac.id>.

¹⁵ Khairin Defriatno Neke, "Ibu Tenggelamkan. Bayinya Usia 4 Bulan Memiliki Riwayat Baby Blues," *kompas.com*, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/26/21585121/ibu-tenggelamkan-bayinya-usia-4-bulan-memiliki-riwayat-baby-blues>. Diakses pada 26 Oktober 2023.

dalam ember penuh air. Diduga ibu mengalami *baby blues syndrome*, hal ini serupa dengan keadaan ibu (A) yang memiliki tiga orang anak, satu perempuan dan dua laki-laki yang masih balita. Ibu korban kelelahan mengurus ketiga anaknya hingga membuat mentalnya terganggu. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku mengalami depresi, stres, dan mengalami kebingungan pada saat ia harus merawat 3 bayinya tersebut. Ibu ini menceburkan bayi laki-lakinya dalam kondisi tidak sadar saat asik menelepon dengan temannya. Awalnya, sang ibu (A) menurunkan bayi ke dalam sebuah ember air yang cukup besar di kamar mandi. Setelah dibawa ke dalam ember, bayi itu dibiarkan mengapung untuk beberapa saat sambil menangis. Meskipun bayi tersebut menangis dengan keras, sang ibu tetap membiarkannya mengapung di dalam ember. Bahkan, sang ibu menyalakan keran air langsung mengarah ke wajah bayi tersebut. Layaknya boneka, bahkan sang ibu membalikkan tubuh sang anak dengan posisi kepala berada di bawah. Sementara anak terus menangis, namun ibu anak tersebut seakan menghiraukan tangisan bayinya.¹⁶ Dari kasus-kasus yang terjadi dapat dilihat gejala yang dialami ibu sama dengan ciri-ciri dari orang yang mengalami *baby blues syndrome*, namun dalam hal ini sindrom yang dialami ibu sudah mencapai ke tingkatan *postpartum depression* dimana gejalanya lebih parah dan berlangsung lebih lama dari *baby blues syndrome*.

¹⁶ Bachtiarudin Alam, "Kronologi Bayi Ditenggelamkan Ibu Di Ember, Diduga Alami Baby Blues Syndrome," Liputan6.com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6985540/komnas-pa-ibu-tenggelamkan-bayi-dalam-ember-di-jaksel-alami-baby-blues>. Diakses pada 26 Oktober 2023.

Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penganiayaan terhadap anak dilarang secara tegas pada Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Sanksi bagi pelanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 80 UU tersebut, Ayat (1) yang menetapkan bahwa pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp 72.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan ini sangat jelas bahwa peraturan di Indonesia menjamin hak-hak anak, salah satunya dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang ibu penderita *baby blues syndrome* yang menganiaya anaknya memenuhi unsur delik penganiayaan. Dalam hukum pidana, apabila pelakunya melakukan kesalahan dan mengandung unsur pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan kesalahan itu dapat dianggap bertanggungjawab atas kesalahannya.

Jadi ibu sebagai pelaku penganiayaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sudah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Namun mengenai seorang ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan anak dapat bertanggung jawab atau tidak, belum diatur secara jelas, karena jika dilihat dari kemampuannya bertanggungjawab, ibu yang

mengalami sindrom *baby blues* melakukan perbuatannya disebabkan oleh terganggunya kesehatan jiwanya sehingga sebagian ibu tidak bisa mengontrol emosinya yang membuat ibu tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan bahkan membunuh anak yang baru dilahirkannya.

Pasal 44 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, Ayat (1) menekankan bahwasanya “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dengan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan tanggung jawab pelaku tindak pidana, sementara itu perbuatannya tetap melanggar hukum. Seseorang tidak boleh dipidana jika memenuhi alasan yang ditekankan dalam pasal ini, namun rumusan pasal ini tidak membedakan dengan jelas antara dua bentuk gangguan jiwa sebagai alasan penghapusan pidana.¹⁷ Seperti sindrom *baby blues* ini yang mempunyai tiga tingkatan, akan tetapi belum diketahui apakah dari ketiga sindrom ini dapat memenuhi unsur seseorang dijatuhkan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana seperti diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, tidak semua pelaku tindak pidana yang dianggap menderita gangguan jiwa secara otomatis akan dibebaskan dari sanksi perbuatannya, kemampuan mereka untuk bertanggung jawab haruslah dinyatakan oleh seorang ahli sebagai bukti yang valid.

Sementara dalam KUHP yang baru pertanggungjawaban pidana diatur pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

¹⁷ Muhammad Dwi Rafky, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder,” *Journal of Legal Studies Volume 1*, no. 1 (2023): hlm. 309-310, <https://online-journal.unja.ac.id/jols/issue/vieww/1596>.

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 38 menyatakan “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”.

Sebagian besar ibu mengalami *baby blues*, dan itu bukanlah suatu kondisi yang masuk dalam kualifikasi gangguan jiwa yang serius. Ini bersifat sementara dan biasanya mereda sendiri dalam beberapa minggu setelah melahirkan. Tetapi *baby blues syndrome* yang dialami ibu dapat berkembang ke *postpartum depression* hingga *postpartum psychosis*, akibat tidak adanya perhatian terhadap kondisi ibu, menyebabkan kondisinya semakin parah. Oleh karena itu untuk membuktikan kejiwaan dan kemampuan pertanggungjawaban seorang ibu yang melakukan penganiayaan diperlukan keterangan dari seorang ahli kejiwaan atau psikiater untuk dimintai keterangannya dengan dibuktikan dengan surat *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP). Seperti yang ditetapkan pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk kepentingan Penegakan Hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa.

Berdasarkan uraian masalah, penulis ingin melakukan penelitian berupa penelitian skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut dan menjadi bahan referensi bagi pembaca tentang pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana bagi ibu yang mengalami baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak.

E. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda, dan supaya lebih mudah memahami dan mengetahui maksud dari penelitian ini, maka penulis menjabarkan definisi atau pengertian yang sehubungan dengan penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian terhadap keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.¹⁸

2. *Baby Blues Syndrome*

Ibu yang baru melahirkan nantinya mengalami gangguan psikologis dan mood yang disebut dengan *baby blues syndrome*, atau *postpartum blues*, ataupun *maternity blues*. *baby blues syndrome* terjadi sepuluh hingga dua minggu setelah hari pertama melahirkan. Jika

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 190.

berlanjut lebih lama dari itu, dapat meningkat menjadi *postpartum depression* dan *postpartum psychosis*.¹⁹

3. Tindak pidana Penganiayaan

Menurut Moeljanto, “*strafbaarfeit*” atau perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang sudah diatur dan dilarang oleh aturan hukum yang bilamana dilanggar akan diancamkan berbentuk sanksi pidana tertentu.²⁰ Beberapa peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” selain itu termasuk juga peristiwa, perbuatan, tindak pidana, serta delik, pelanggaran hukum dan kejahatan. Tindak pidana penganiayaan yakni suatu tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan bagi korbannya, sehingga akibat perbuatannya seseorang itu haruslah dipidana.

4. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹⁹ Rafidah Nur Raharjo, “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak,” *Jurist-Diction* 5 no. 3 (2022): hlm. 10, <https://doi.org/10.20474/jd.v5i3.3583>.

²⁰ Moeljanto, *Asas - Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), hlm 59.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan penjelasan dari Simons, *strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berlawanan dengan hukum yang diperbuat seseorang yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya dan dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang.²¹ Jonkers dan Utrech memandang pendapat dari Simons ini sudah lengkap yang meliputi:

- a. Diancam hukuman pidana
- b. Melanggar hukum
- c. Dilaksanakan oleh individu yang bersalah
- d. Individu tersebut dianggap bertanggung jawab atas tindakannya.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum pidana sebagai penegas bahwa pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengacu pada dasar pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²³ Dasar dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan, setiap perbuatan pelaku wajib dikenakan pidana yang disesuaikan dengan ketentuan yang

²¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020), hlm. 97.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi ke-4 (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008), hlm. 96.

²³ Moeljatno. *Op.Cit*, hlm 165.

dilanggar.²⁴ Selanjutnya berdasarkan pendapat dari Pompe, Kesalahan yakni segi dalam, yang berkaitan dengan kehendak si pembuat, mampu diamati melalui dua sudut, menurut akibatnya artinya hal yang dapat dicelakakan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya hal yang mampu dihindarinya (*vermijdbaarheid*) perbuatan melawan hukum.²⁵

Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tergantung pada apakah dia ada kesalahan saat melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika syarat pertanggungjawaban belum terpenuhi.²⁶ Berdasarkan teori kesalahan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*), melakukan perbuatan dengan sengaja, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu
 - a. Sengaja Sebagai Niat, hubungan antara tindakan dengan niat, yang berarti bahwa pelaku benar-benar menginginkan hasil dari tindakannya untuk mencapai tujuannya.
 - b. Kesengajaan Sebagai Kepastian, pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tapi hanya untuk mencapai tujuannya atau dengan kata lain untuk mencapai tujuannya, ia harus melakukan perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan Sadar Akan Kemungkinan, apabila dengan dilakukannya perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang menjadi tujuan, pelaku menyadari akan ada akibat lain yang akan terjadi.
2. Kealpaan (*culpa*), hubungan batin seseorang dalam melakukan perbuatannya, adanya sifat kurang berhati-hati melakukan perbuatannya, sepatutnya seseorang menduga-duga akibat dari perbuatannya.²⁷

²⁴ Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, and M. Rapik, "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 5, no.1 (2024): hlm. 17, <https://online-journal-unja.ac.id/Pampas//article>.

²⁵ Jhon Kenedi. *Op. Cit*, hlm. 107.

²⁶ Rima Marlendi, Elly Sudarti and Herry Liyus " Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2023): hlm. 4. <https://repository.unja.ac.id/49726/>

²⁷ John Kenedi. *Op. Cit*, hlm. 110.

Maka dari itu apabila terdapatnya kesalahan yang menyebabkan dipidananya seseorang haruslah memenuhi seperti berikut.²⁸

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab.

Keadaan mental seseorang yang melakukan tindak pidana harus normal dan sehat saat melakukan perbuatannya. Menurut pendapat Simons:

Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada keadaan psikologis yang memungkinkan seseorang untuk secara beralasan membenarkan tindakan pidana yang dilakukan, baik secara umum maupun dari perspektif individu yang bersangkutan. Lebih lanjut, dikatakan bahwasanya seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu mempertanggungjawabkan bilamana:

- a. Mampu mengetahui/ menyadari bahwasanya perbuatannya berlawanan dengan hukum
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁹

Berdasarkan aturan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam pasal 44 KUHP, diperlukan penilain terhadap kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, yakni :

- a. Dalam menentukan keadaan jiwa pelaku hendaknya dinilai oleh ahlinya, dalam hal ini psikiater.
- b. Penilaian hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa si pelaku dan perbuatannya, yang ditentukan secara normatif oleh seseorang hakim.³⁰

3. Kesalahan

Yaitu hubungan batin seseorang dengan tindakannya berupa sengaja atau kealpaan.

²⁸ E.Y. Kanter S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 165

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), hlm. 85.

³⁰ *Ibid*, hlm. 89-90.

4. Tidak ada alasan penghapus pidana

Merupakan alasan menghapuskan kesalahan sipelaku. Jika perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, ada juga alasan penghapusannya dalam hukum pidana, yang diputuskan oleh hakim yang menyatakan menghapus kesalahan pembuat, karena ketentuan hukum dan undang-undang yang membenarkannya perbuatan atau yang memaafkan pembuatnya.³¹

2. Teori Pidanaan

Jan Remmelink berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan akan bertentangan dengan hukum pidana. Satu sisi tujuannya untuk melindungi masyarakat. Namun disisi lain, penegakan hukum pidana menyebabkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya.³² Dalam hukum pidana, pidanaan juga dapat diartikan sebagai hukuman atau pemberian sanksi. Istilah umum “pidana” mengacu pada hukum, sedangkan “pidanaan” mengacu pada penghukuman. Ada beberapa teori dalam pidanaan, yang berbicara tentang alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi),³³ yakni :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

³¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm 105, <http://repo.jayabaya.ac.id/2154/>.

³² Leo Arwansyah, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 3, (2020): hlm. 15, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>

³³ John Kenedi, *Op. Cit*, hlm. 129.

Teori ini menyatakan bahwa pembedaan yang diberikan sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku karena melakukan kejahatan yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain atau masyarakat.³⁴ Berdasarkan prinsip ini, hukuman dapat dibebankan hanya jika seseorang sudah melakukan tindak pidana atau pelanggaran (*quia peccatum est*).³⁵

Menurut Karl O. Christiansen, teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:

- 1) Pidana bertujuan sebagai pembalasan terhadap pelaku
- 2) Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana hanyalah pembalasan
- 3) Pidana hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki kesalahan
- 4) Penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat
- 5) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.³⁶

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori ini memandang bahwa maksud dari pembedaan adalah untuk pencegahan terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan tersebut.³⁷ Teori ini didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, hlm. 130.

³⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan ke-4 (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 10.

³⁶ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan Development Of," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): hlm. 180, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/4>.

³⁷ Erdianto Effendi. *Op. Cit*, hlm. 142.

- 1) Menjerakan
Dengan diberinya hukuman kepada pelaku, diharapkan memberikan rasa jera kepadanya sehingga tidak mengulangnya (*special preventive*) dan menjadi pembelajaran bagi orang lain bahwa jika mereka melakukan hal yang sama, mereka akan dihukum dengan pidana yang serupa (*generale preventive*).
- 2) Memperbaiki Diri Terpidana
Selama menjalani hukuman terpidana akan diberikan perlakuan dan pendidikan dengan tujuan agar terpidana memiliki penyesalan akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga ketika terpidana kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama.
- 3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya
Yaitu penjatuhan hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati.³⁸

c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori gabungan yaitu menggabungkan dua tujuan pemidanaan yakni pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dan menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Untuk itu pembalasan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku harus seimbang agar keadilan dan kepuasan masyarakat dapat dicapai.

Dari 3 (tiga) teori pemidanaan diatas dapat disimpulkan bahwa gagasan mengenai pemidanaan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan teori absolut atau teori pembalasan, yang memiliki sifat tegas pada tindak pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan agar terciptanya

³⁸ Jhon Kenedi. *Op. Cit*, hlm 130.

kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai ini dibutuhkan pemidanaan terhadap pelaku, agar pembuat tidak lagi mengulangi perbuatannya.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan didefinisikan sebagai “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Berdasarkan kedua istilah asing ini, alhasil istilah “kebijakan hukum pidana” juga dapat disebut sebagai “politik hukum pidana”. Selain kedua istilah “politik hukum pidana” ini, juga sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, seperti “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts politiek*”.

Berdasarkan pendapat Mahfud MD, kebijakan hukum merupakan garis kebijakan yang sah terhadap suatu peraturan yang hendak ditegakkan baik dengan membuat peraturan baru maupun menggantikan peraturan lama, untuk mencapai tujuan bernegara. Atas dasar ini, kebijakan hukum adalah suatu pilihan peraturan yang akan dilaksanakan serta pilihan peraturan yang akan dibatalkan atau tidak ditegakkan, dan semuanya direncanakan guna mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam kata pembukaan UUD 1945.³⁹

Menurut penjelasan Sudarto, kebijakan hukum pidana diambil dari pengertian politik hukum, yaitu:

- a. Usaha guna menciptakan regulasi yang baik yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu.
- b. Kebijakan yang disusun melalui lembaga yang berwenang di suatu negara untuk menetapkan aturan yang diinginkan dan

³⁹ Dodik Haryono, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Tindak Pidana Anak” (Universitas Jambi, 2021), hlm. 16.

diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁰

Sesuai pada pandangan A. Mulder, maka garis Kebijakan Hukum Pidana dibuat dengan tujuan untuk menetapkan:

- a. Sejauh mana peraturan pidana yang ada saat ini perlu diperbaharui
- b. Usaha dan kebijakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Bagaimana penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana yang semestinya diterapkan.⁴¹

Hal ini menunjukkan bahwa garis kebijakan adalah suatu bentuk tindakan untuk mengupayakan, membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pada dasarnya, kebijakan ini tidak lepas dari tujuan untuk mencegah kejahatan.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Jurnal Rafidah Nur Raharjo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”. Kesimpulan dari peneliti terdahulu yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, *baby blues syndrome* masuk kualifikasi kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues*

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. Media Grafika 77, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

⁴¹ Dodik Haryono, *Op. Cit*, hlm. 18.

syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak, dilihat dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP, KUHP baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Fitriana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome* (Studi Kasus Perkara No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”. Kesimpulan dari peneliti terdahulu yaitu penerapan hukum pidana terhadap ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome* berdasarkan putusan perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl yang mana telah dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP, karena telah menggorok leher anaknya yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan pisau kater. Penjatuhan hukuman dalam Putusan tersebut tidak tepat dikarenakan adanya faktor *baby blues syndrome*. Dimana seharusnya pelaku tersebut masuk kedalam kategori yang mendapatkan alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukuman pidana bagi orang yang mengalami cacat jiwa, sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Pasal 44 KUHP. Adapun perbedaan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu berfokus bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan anak dengan

melakukan Studi Kasus Perkara No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl). Sedangkan penelitian ini penulis lebih berfokus bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan anak dan penulis berpendapat bahwasanya ibu yang mengalami *baby blues syndrome* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak masuk dalam alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana.

3. Jurnal yang ditulis oleh Saskia Dyah Hapsari dan Yana Indawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya tahun 2022 yang berjudul “Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disebabkan Oleh Baby Blues Syndrome”. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yakni pada penelitian terdahulu menggali mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Kesimpulan dari peneliti terdahulu yaitu penyandang *baby blue syndrome* tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya karena dianggap mengalami cacat jiwa dan seharusnya mendapatkan penanganan khusus agar tidak berkembang menjadi *postpartum depression* atau *postpartum psychosis* yang dianggap gila. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penulis lebih berfokus bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan anak. Penulis berpendapat bahwa ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana gangguan ini merupakan depresi ringan dan tidak masuk kategori gangguan jiwa serius sehingga pelaku tidak masuk dalam alasan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis butuhkan pada penelitian ini yakni :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan menganalisis seluruh pedoman hukum yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini adalah penelitian yang menitikberatkan pada ketetapan undang-undang menjadi bahan rujukan pada penelitian.⁴²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁴² Irwansyah, *Penelitian Hukum-Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm.133.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini diterapkan karena karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁴

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah peraturan yang dijadikan sebagai acuan pada penyusunan penelitian, yang digunakan pada penulisan ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah pada penyusunan ketetapan undang-undang dan putusan hakim.⁴⁵ Untuk itu yang menjadi acuan dalam penulisan ini antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi segala publikasi hukum yang bukan termasuk dokumen resmi.⁴⁶ Ini mencakup buku-buku hukum termasuk tesis, skripsi, jurnal hukum, kamus hukum, putusan pengadilan, serta pendapat ahli hukum.

⁴³ *Ibid*, hlm. 138.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cetakan ke-14 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 177.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 181.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 195.

- c. Bahan Hukum Tersier, sebagai sumber pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini yakni situs internet dan website yang berdasarkan pada hukum yang relevan dengan judul penulisan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Mengidentifikasi atau menetapkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian.
- b. Menginventarisasi atau menyusun isi dari bahan hukum yang sudah teridentifikasi dan relevan dengan masalah penelitian
- c. Mensistematisasi atau mengorganisir bahan hukum ke dalam suatu sistem atau kerangka analisis, untuk memaparkan isi yang sesuai permasalahan yang dikaji.
- d. Mengeinterpretasi bahan hukum sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- e. Mengevaluasi atau menilai bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mengerti maksud dari isi penelitian ini secara garis besar dapat dilihat dari sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian yang menjadi landasan bagi bab-bab berikutnya, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian menguraikan tinjauan umum terkait Pertanggungjawaban Pidana, *Baby Blues Syndrome*, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan pembahasan yang khusus menjawab rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari persoalan yang dikaji dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran atas permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.